

BAB II

KONFLIK NAGORNO KARABAKH DAN KETERLIBATAN TURKI

Konflik Nagorno-Karabakh merupakan permasalahan perebutan wilayah antara Armenia dan Azerbaijan. Setelah konflik ini terhenti sejak pertempuran terakhir pada tahun 2016, akhirnya kembali pecah pada tanggal 27 september 2020. Konflik Nagorno-Karabakh yang terjadi mendorong berbagai aktor internasional untuk terlibat dalam konflik ini. Bab II penelitian ini menjelaskan dinamika yang terjadi dalam konflik Nagorno Karabakh serta keterlibatan Turki yang terlibat dalam diplomatic aktif untuk Azerbaijan di forum Internasional, memberikan sejumlah dukungan militer kepada Azerbaijan, menutup perbatasannya dengan Armenia, menolak menormalisasi hubungan serta ikut serta dalam embargo ekonomi sebagai bentuk solidaritas dalam mendukung Azerbaijan selama konflik.

2.1 Dinamika konflik Nagorno- Karabakh

Nagorno Karabakh atau biasa disebut Artsakh merupakan sebuah wilayah di Kaukasus Selatan. Wilayah ini terdiri dari pegunungan dan sungai-sungai. Tembaga, besi, kobalt, arsenik, batu kapur, marmer, sianida, garam mineral, dan garam batu merupakan beberapa sumber daya bawah tanah yang melimpah di Azerbaijan. Tidak hanya itu, Minyak dan gas alam merupakan sumber daya alam Azerbaijan yang paling berharga. Produksinya berada di urutan pertama jika dibandingkan dengan sumber daya lainnya (Süleymanov & Hasanov, 2013). Kemudian, Sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah perkebunan yakni mengelola kebun buah-buahan, peternakan seperti menggembala domba, sapi dan

babi. Serta wilayah ini juga memiliki beberapa industri ringan dan pabrik pengolahan makanan (Britannica, 2023).

Armenia dan Azerbaijan memiliki konflik yang belum terselesaikan terkait wilayah Nagorno-Karabakh. Secara internasional Nagorno-Karabakh diakui sebagai bagian dari Azerbaijan, namun mayoritas populasinya berasal dari etnis Armenia. Pada saat Perang Dunia I telah usai, ketika Armenia dan Azerbaijan memperoleh kemerdekaan dari Kekaisaran Rusia, klaim teritorial atas wilayah Nagorno-Karabakh semakin memanas.

Gambar 2.1 Peta wilayah Nagorno -Karabakh



Sumber: (BBC NEWS, 2023)

Setelah jatuhnya kekaisaran Rusia pada tahun 1918, Armenia dan Azerbaijan mendeklarasikan kemerdekaannya. Konflik Nagorno-Karabakh dipicu

oleh kemerdekaan Armenia dan Azerbaijan. Namun kemerdekaan Armenia dan Azerbaijan tidak bertahan lama karena Uni Soviet berhasil merebut kembali seluruh wilayah Kaukasus Selatan. Alhasil, pada tahun 1920, Uni Soviet menaklukkan kembali Armenia, Azerbaijan, dan wilayah Nagorno-Karabakh. Sementara itu, kedaulatan Nagorno Karabakh dikuasai oleh Uni Soviet. Wilayah Nagorno-Karabakh pada dasarnya adalah wilayah yang 95% penduduknya adalah etnis Armenia dan sebagian lagi adalah etnis Azerbaijan (Febriani, 2018). Adanya perbedaan komposisi ini yang pada akhirnya menimbulkan perseteruan pada saat pengaturan wilayah.

Isu perang antara Armenia dan Azerbaijan yang menjadi isu mendasar adalah pengaturan status wilayah Nagorno-Karabakh. Dalam prinsip Wilson yang dideklarasikan pada tahun 1918, “Setiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri” adalah faktor utama yang memicu konflik etnis di wilayah tersebut (UÇAK, 2017). Pada 12 Juni 1921, Dewan nasional SSR Azerbaijan menyatakan Nagorno Karabakh merupakan bagian dari Armenia. Namun, pada bulan Juli wilayah Nagorno-Karabakh ditegaskan kembali pada sidang pleno. Pada tanggal 5 Juli 1921, terdapat keputusan paksa untuk mencaplok Nagorno-Karabakh ke Azerbaijan dan membentuk oblast otonom di wilayahnya dibuat tanpa mengikuti protocol. Hal ini dilakukan atas perintah langsung uni soviet dan campur tangan langsung oleh Joseph Stalin (ministry of foreign affairs of the republic of armenia, 2022).

Etnis Armenia kecewa dengan legitimasi Daerah Otonomi Nagorno-Karabakh (NKAO) yang diterima Azerbaijan. Kerangka hukum dan konstitusi Uni Soviet pada tahun 1935 dan 1977 menjadi landasan legalitas NKAO (Mahmudlu &

Ahmadov, 2014:118). Masyarakat Armenia di Nagorno-Karabakh tidak pernah menerima keputusan tersebut dan terus berupaya memperjuangkan untuk bersatu kembali dengan tanah air mereka. Diskriminasi dari Azerbaijan terhadap Nagorno-Karabakh berdampak pada penduduk dan menjadi alasan utama migrasi. Akibatnya, terdapat perubahan komposisi penduduk Nagorno Karabakh, yang pada tahun 1923 orang Armenia berjumlah 94,4 % dari seluruh penduduk Karabakh menjadi 76,9% pada tahun 1989 (ministry of foreign affairs of the republic of armenia, 2022).

Ketika posisi Uni Soviet semakin terbuka, benih-benih perang mulai tumbuh di wilayah Daerah Otonomi Nagorno-Karabakh (NKAO). Kepresidenan Mikhail Gorbachev di Uni Soviet pada tahun 1985 menandai pergeseran menuju keterbukaan yang lebih besar. Karena Gorbachev menjadikan Glasnost dan Perestroika sebagai bagian dari pemerintahannya, dan transparansi menjadi lebih baik. Kebijakan perestroika, yang berarti restrukturisasi, dirancang untuk mereformasi system ekonomi dan politik uni soviet, sementara kebijakan glasnost, yang berarti keterbukaan, merujuk pada kebebasan individu dalam berpendapat dan memperoleh informasi (Goswami, 2020: 2-3). Implementasi kebijakan ini memicu protes besar-besaran dari komunitas etnis Armenia di wilayah NKAO, yang menuntut agar Nagorno-Karabakh dimasukkan ke dalam wilayah Armenia (Fatoni, 2019:448).

Pada tahun 1988, Nagorno Karabakh memilih untuk berpisah dari soviet Azerbaijan dan bergabung dengan Armenia. Setelah runtuhnya uni soviet, perang pun tidak terhindarkan. Sebanyak 30.000 korban jiwa dan ratusan ribu masyarakat mengungsi sampai pada akhirnya gencatan senjata diberlakukan. Armenia

memenangkan pertempuran dengan mengambil wilayah Nagorno Karabakh dan beberapa distrik sekitarnya. Wilayah yang diambil oleh Armenia terdapat tujuh distrik yaitu Lachin, Kalbajar, Jebrail, Zangelan, Kubatlin, Agdam, dan Fizulin. Meskipun gencatan senjata telah diberlakukan, peperangan dalam skala kecil tetap berlanjut (The Economist, 2016).

Pada tahun 1991, Azerbaijan mendeklarasikan kemerdekaannya pada bulan Agustus. Setelah kemerdekaan Azerbaijan, orang-orang Armenia yang tinggal di Nagorno Karabakh mendeklarasikan republik Armenia Artsakh dan beralih strategi untuk memisahkan Nagorno Karabakh dari Azerbaijan. Namun, parlemen Azerbaijan bereaksi dengan menyatakan bahwa keadaan ini bertentangan dengan konstitusi Azerbaijan. Pada tahun 1992, meskipun kedua belah pihak berkumpul di Moskow dan mencapai kesepakatan gencatan senjata, pasukan Armenia melakukan pembantaian dengan serangan Khojaly. Akhirnya pada maret 1992, OSCE memutuskan untuk mencari solusi konflik Nagorno Karabakh di Minsk. Namun, terlepas dari semua upaya kelompok Minsk mencari solusi, pihak Armenia terus melanjutkan serangan dan pendudukannya. Pada akhir bentrokan total pada tahun 1993, pasukan Armenia telah menduduki tujuh wilayah yang berdekatan di samping wilayah bekas NKAO. Selanjutnya terdapat “Protokol Bishkek” ditanda tangani antara Armenia dan Azerbaijan di Moskow pada tahun 1994 dengan mediasi Rusia dan sejak saat itu, meskipun sengketa Karabakh telah dilihat sebagai masalah pasca Soviet yang terhenti, insiden kekerasan tidak pernah benar-benar berakhir (Wakizaka, 2022). Dengan kata lain, perdamaian konflik antara Armenia dan Azerbaijan belum tercapai.

Meskipun gencatan senjata resmi mengakhiri Perang Nagorno-Karabakh Pertama pada tahun 1994, terdapat periode ketegangan yang terus berlanjut di Nagorno-Karabakh dari tahun 1994 hingga 2016. Pada tanggal 1 April 2016, eskalasi meningkat dan terjadi perang yang juga disebut dengan “Empat hari perang”. Konfrontasi ini diawali dengan serangan mendadak yang diduga dari Azerbaijan. Kedua belah pihak menderita korban dan luka-luka akibat kekerasan pertempuran yang luar biasa. Serangan di daerah tersebut menyebabkan kerusakan di banyak desa dan kota. Banyak orang terpaksa mengungsi demi menghindari konflik yang berdampak buruk pada warga sipil. Pada tanggal 5 April 2016, Armenia dan Azerbaijan secara bersamaan menyerukan gencatan senjata dan memutuskan untuk mengakhiri konflik setelah empat hari peperangan sengit. Meskipun pertempuran berakhir karena gencatan senjata ini, ketegangan masih tetap tinggi dan perundingan perdamaian masih belum membuahkan hasil (Jarosiewicz, 2016). Situasi di Nagorno-Karabakh tetap belum membaik antara tahun 2016 dan 2020, dengan kerusakan dan ketegangan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Meskipun tidak ada bentrokan besar seperti yang terjadi pada tahun 2016, situasinya masih genting dan konflik semakin meningkat menjelang Perang Karabakh Kedua pada tahun 2020.

Setelah sekian lama konflik terhenti, Perang Karabakh kedua pecah pada tahun 2020. Konfrontasi paling intens sejak gencatan senjata tahun 1994 dimulai. Disaat satu dunia sedang fokus menangani pandemi Covid-19 yang mengalihkan perhatian komunitas internasional dan menghambat diplomasi, pertempuran serius tidak dapat dihindarkan. Dengan dukungan dari sekutu strategisnya Turki, Azerbaijan melancarkan serangan perang besar-besaran di Nagorno-Karabakh.

Perang berlangsung selama empat puluh hari sejak tanggal 27 September 2020. Peperangan ini menyebabkan hampir 150 korban, termasuk 50 warga sipil di Nagorno-Karabakh dan 98 kematian warga sipil di Azerbaijan. Selanjutnya, 2,317 tentara di pihak Armenia tewas bersama 2,783 tentara di Azerbaijan. Lebih dari 130.000 orang mengungsi akibat konflik, termasuk 90.640 dari dalam Nagorno-Karabakh yang tiba di Armenia dan sekitar 40.000 pengungsi sementara di daerah yang dekat dengan garis kontak di pihak Azerbaijan. Para pengungsi ini sebagian besar telah dapat kembali ke rumah mereka pada awal Desember (ACAPS SECONDARY DATA REVIEW, 2020)

Dalam pertempuran yang sengit antara Armenia dan Azerbaijan mengalami sejumlah kerugian alutsista pada dua negara. Kerugian alutsista dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kerugian Alutsista Armenia dan Azerbaijan

No	Jenis kerugian Armenia	Rincian kerugian
1.	230 unit tank	133 hancur, 5 rusak dan 93 tertangkap
2.	67 unit Armoured Fighting Vehicles	26 hancur dan 41 tertangkap
3.	73 unit Infantry Fighting Vehicles	29 hancur dan 44 tertangkap
4.	15 unit Self-propelled anti-tank missile system	3 hancur dan 12 tertangkap
5.	215 unit Towed Artillery	119 hancur, 10 rusak dan 86 tertangkap
6.	24 unit Self-propelled Artillery	16 hancur, 1 rusak dan 7 tertangkap
7.	76 unit Multiple Rocket Launcher	72 hancur, 3 rusak dan 1 ditinggalkan
8.	1 unit Rudal Balistik	Hancur
9.	44 unit Mortars	4 hancur dan 40 tertangkap
10.	88 unit Anti-tank Guided Missile	5 hancur dan 83 tertangkap
11.	3 unit Man Portable Air Defense Systems	Tertangkap

12.	10 unit Self-propelled anti-aircraft guns	1 hancur dan 9 tertangkap
13.	31unit Surface-to-air Missile Systems	27 hancur dan 4 tertangkap
14.	3 unit Jammer and Deception Systems	Hancur
15.	2 unit pesawat dan helikopter	Hancur.
16.	4 unit PTTA	Hancur
17.	570 unit truk, kendaraan ringan dan jeep	265 hancur, 8 rusak dan 299 tertangkap
18.	2 unit Decoy	Hancur
19.	8 stasiun radio	Hancur
20.	8 basis militer	Hancur
21.	4 pos komando	Hancur
22.	4 depot penyimpanan	Hancur
23.	1 Airport Stepanakert	Hancur
No	Jenis kerugian Azerbaijan	Rincian Kerugian
1.	43 unit tank	26 hancur, 13 rusak, 1 ditinggalkan dan 3 tertangkap
2.	47 unit Infantry Fighting Vehicles	26 hancur, 3 rusak, 10 ditinggalkan dan 8 tertangkap
3.	1 unit Multiple Rocket Launcher	Hancur
4.	1 unit Mortars	tertangkap
5.	13 unit pesawat dan helicopter	hancur
6.	26 unit PTTA	22 hancur dan 4 tertangkap
7.	49 unit truk, kendaraan ringan dan jeep	21 hancur, 15 rusak, 8 ditinggalkan dan 4 tertangkap

Sumber: (Oryx, 2020)

Bila dicermati secara sekilas, terdapat perbedaan signifikan pada kerugian yang dialami oleh kedua negara yang berseteru itu. Armenia mengalami banyak kerugian pada tank, kendaraan lapis baja, meriam artileri, lokasi strategis dan sarana prasarana penunjang pertempuran. Di sisi lain, Azerbaijan hanya mengalami kerugian yang signifikan pada 37-unit drone bila dibandingkan dengan Armenia. Hal ini dapat diartikan bahwa penggunaan drone (pesawat terbang tanpa awak) dalam konflik Armenia dan Azerbaijan terbukti efektif. Dengan adanya kerugian perang ini, membuat negara Azerbaijan mencari kerjasama untuk mengatasi krisis salah satunya dengan tetap menjalin hubungan strategis dengan Turki.

Perjanjian gencatan senjata ditandatangani antara Armenia, Azerbaijan, dan Rusia pada 9 November. Menurut perjanjian ini, Azerbaijan akan mengendalikan bagian-bagian Nagorno Karabakh yang direbut Armenia selama pertempuran, dan juga akan diambil alih kembali tujuh wilayah distrik di sekitar Nagorno Karabakh yang sebelumnya dikuasai oleh Armenia. tujuh distrik tersebut adalah Fuzuli, Jabrayil, Zangilan, Qubadli, Agdam, Kalbajar, dan Lachin. Pasukan Armenia diharuskan untuk meninggalkan Nagorno-Karabakh dan wilayah sekitarnya. Penduduk etnis Armenia juga mengosongkan wilayah yang sekarang berada dibawah kendali Azerbaijan (Kucera, 2020).

Pasukan penjaga perdamaian Rusia dikerahkan untuk memantau gencatan senjata baru yang ditengahi Moskow, dan juga untuk memastikan jalur yang aman melalui “koridor Lachin” yang memisahkan Nagorno-Karabakh dari Armenia. Pasukan Armenia setuju untuk mengembalikan ke Azerbaijan seluruh wilayah yang diduduki di luar bekas Daerah Otonomi Nagorno-Karabakh Soviet (BBC NEWS, 2023).

2.2. Hubungan diplomatik Turki - Azerbaijan

2.2.1 Deklarasi susha dan Kerjasama di berbagai bidang

Hubungan diplomatik Turki dan Azerbaijan dimulai sejak tahun 1991. Turki adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Azerbaijan pada 9 November 1991. Dalam membangun kerjasama politik antara Turki dan Azerbaijan dimulai pada pemerintahan presiden pertama Azerbaijan, yakni Ayaz Mutallibov. Turki mendirikan konsulat di Azerbaijan pada tahun 1991 dan membuka kedutaan besar pada tahun 1992 (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye). Selama bertahun-tahun, hubungan kedua negara telah berubah menjadi aliansi strategis (Affairs, 2021). Peningkatan hubungan Turki dan Azerbaijan menjadi aliansi strategis ditandai dengan adanya penandatanganan Deklarasi Shusha. Deklarasi Shusha merupakan sebuah perjanjian yang bertujuan untuk memajukan hubungan bilateral ke tingkat aliansi. Deklarasi tersebut menyerukan kerja sama di bidang teknologi industri pertahanan, energi, transportasi, ekonomi dan kemanusiaan, serta penciptaan rute transit baru. Hal ini juga menyerukan dukungan dan bantuan timbal balik jika terjadi ancaman atau agresi (Shahbazov, 2021). Adanya deklarasi ini semakin memperkuat posisi Azerbaijan secara regional, menjamin keamanan di Kaukasus Selatan dan adanya prospek ekonomi yang baik di kedua belah pihak.

Turki dan Azerbaijan bekerja sama di bidang pelatihan militer dalam kerangka "Perjanjian Kerjasama Pelatihan Militer" yang ditandatangani pada 11 Agustus 1992 dan "Perjanjian Kerja Sama Pelatihan Militer, Teknik dan Ilmiah" yang ditandatangani pada 10 Juni 1996. Berikut merupakan kerjasama yang dilakukan antara Azerbaijan dan Turki. Pertama, Pelatihan tentara Azerbaijan di Turki. Sebagai bagian dari kerja sama militer yang berkelanjutan, Turki dan

Azerbaijan telah melakukan latihan militer bersama. Kedua, negara memiliki sejarah panjang dalam kerja sama militer; Azerbaijan telah menjadi tuan rumah latihan militer dengan Turki di sejumlah daerah, termasuk daerah Nakhchivan yang berbatasan dengan Turki dan provinsi Nagorno-Karabakh. Dalam mempertahankan hubungan yang erat, komandan militer Turki mendorong adanya pembukaan institusi militer di Azerbaijan, dan para perwira Azerbaijan dilatih di Perguruan Tinggi Militer Turki sejak tahun 1990-an. Tujuan dari kemitraan militer ini adalah untuk membawa tentara Azerbaijan lebih dekat dengan model Turki melalui pengembangan dan reorganisasi. Azerbaijan dan Turki memiliki hubungan militer yang erat, Aliansi militer ini telah mengarah pada pengembangan dan restrukturisasi tentara Azerbaijan, dengan tujuan untuk menyelaraskannya dengan model Turki. Latihan militer bersama ini berfungsi sebagai demonstrasi hubungan militer yang kuat antara Azerbaijan dan Turki, yang telah diperkuat lebih lanjut setelah kemenangan Azerbaijan dalam Perang Karabakh Kedua (Reuters, 2023).

Selanjutnya, latihan militer gabungan. Frekuensi latihan militer bersama antara Azerbaijan dan Turki telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, kedua negara mengadakan latihan militer berskala besar, yang melibatkan Angkatan Darat dan Angkatan Udara, yang berlangsung di berbagai wilayah, termasuk Baku dan Nakhchivan. Menurut Kementerian Pertahanan Azerbaijan, lebih dari 20 latihan militer bersama diadakan antara kedua negara pada tahun 2022 saja (VELIYEV, 2022). Pada tahun 2023, latihan militer bersama yang dinamakan Mustafa Kemal Atatürk 2023 melibatkan hingga 3.000 personel militer, 130 kendaraan lapis baja, dan 100 artileri dari kedua negara dan diadakan di berbagai wilayah Azerbaijan, termasuk wilayah Nagorno-Karabakh

(TRT World, 2023). Hal ini menandai peningkatan substansial dari tahun-tahun sebelumnya dan menggarisbawahi kerja sama militer yang semakin dalam antara kedua negara. Meningkatnya frekuensi latihan ini mencerminkan penguatan aliansi militer dan kemitraan strategis antara Azerbaijan dan Turki.

Salah satu bidang hubungan terpenting antara Azerbaijan dan Turki adalah pendidikan. Dalam 30 tahun terakhir, landasan hukum yang diperlukan telah diciptakan untuk mewujudkan kerja sama multilateral di bidang pendidikan antara dua negara bersaudara. Saat ini, lebih dari 24.000 warga Republik Azerbaijan sedang menempuh pendidikan di berbagai jenjang pendidikan tinggi (sarjana, magister, doktoral, spesialisasi kedokteran, dll) di Republik Turki (Embassy of the republic of Azerbaijan to the republic of turkiye, 2023).

Azerbaijan dan Turki, selain memiliki budaya yang sama, juga memiliki beberapa ciri budaya khusus yang unik dari kedua negara, yang penting untuk saling mempromosikan dan meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat. Untuk itu, *Culture Days* diselenggarakan di kedua negara masing-masing. Karya-karya seniman ternama kedua negara diajarkan di perguruan tinggi dan secara rutin diperkenalkan kepada masyarakat serta sangat diapresiasi oleh masyarakat. Peristiwa seperti ini tentu saja semakin mendekatkan kedua bangsa yang bersaudara ini. Organisasi Internasional Kebudayaan Turki (TURKSOY) menawarkan platform untuk tujuan kebudayaan. Sebuah provinsi yang bernama Shusha sebagai tempat lahirnya kebudayaan Azerbaijan, dinyatakan sebagai ibu kota kebudayaan dunia Turki pada tahun 2023 pada pertemuan luar biasa Dewan Permanen TURKSOY yang diadakan di Bursa pada tanggal 31 Maret 2022 (Embassy of the republic of Azerbaijan to the republic of turkiye, 2023).

2.2.2 Bantuan Turki kepada Azerbaijan

Turki merupakan satu-satunya negara pendukung Azerbaijan dan mengutuk Armenia sebagai agresor atau negara yang memulai konflik. Kebijakan jangka panjang Turki terhadap Azerbaijan sebagai berikut (Bolukbasi, 1997) : Dukungan untuk kemerdekaan Azerbaijan, dukungan terhadap kedaulatan Azerbaijan atas Karabakh, pencegahan atau pembatasan kehadiran dan pengaruh rusia di wilayah tersebut, partisipasi dalam produksi dan ekspor minyak Azerbaijan, pemerintahan yang ramah tetapi tidak harus pan-Turki-Azerbaijan.

Turki merupakan negara pertama yang mengakui Azerbaijan sebagai negara berdaulat setelah Azerbaijan mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1991. Pengakuan dari Turki ini penting dikarenakan dapat memperkuat posisi Strategis Azerbaijan di Kawasan dan panggung Internasional, serta dapat meningkatkan keuntungan dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi dan keamanan. Dalam hal konflik Nagorno Karabakh pengakuan dari Turki sangat membantu Azerbaijan untuk mendapatkan hak-hak sebagai negara. Pada masa awal ini, Turki mengambil posisi netral dalam konflik Nagorno-Karabakh. Turki mempertahankan posisinya sebagai mediator yang tidak memihak antara Armenia dan Azerbaijan dan mengusahakan cara – cara damai untuk menyelesaikan konflik. Namun, perang yang semakin memanas khususnya pembantaian warga sipil di desa Khojaly, Azerbaijan, pada Februari 1992, membuat Turki akhirnya mendukung penuh integritas teritorial dan kedaulatan Azerbaijan atas Nagorno-Karabakh (Abilov, 2015).

Sejak awal eskalasi konflik di awal 1990-an, Turki mendukung Azerbaijan dan secara aktif membawa isu ini ke forum- forum internasional. Turki menjelaskan bahwa Nagorno Karabakh merupakan milik Azerbaijan dan pendudukan yang terjadi harus segera dihentikan. Turki juga menekan pro-armenia agar tidak mendominasi di forum internasional. Selanjutnya, beberapa bantuan dan dukungan yang diberikan oleh Turki kepada Azerbaijan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Tahun 1993, Turki membantu Azerbaijan dengan menutup perbatasan Armenia-Turki sebagai bentuk solidaritas kepada Azerbaijan dan menentang perebutan wilayah yang dilakukan oleh Armenia. Ketika konflik Nagorno-Karabakh meletus, Turki mengambil keputusan untuk mendefinisikan kembali perbatasannya dan hubungannya dengan Armenia. Ini adalah salah satu tindakan yang diambil Turki sepanjang konflik untuk memberikan tekanan pada Armenia. Hubungan antara Turki dan Armenia masih bersitegang, terutama mengingat isu pengakuan Genosida Armenia selama PD I. Menanggapi eskalasi konflik Nagorno-Karabakh, Turki mengumumkan penutupan perbatasan darat dan udara dengan Armenia pada bulan Oktober 2020. Tindakan ini diambil dalam konteks konflik sebagai tindakan pencegahan keamanan terhadap Armenia dan sebagai bentuk dukungan terhadap Azerbaijan.

Kedua, Turki mendukung posisi Azerbaijan dalam sengketa teritorial atas Laut Kaspia dengan Iran. Sengketa ini berkaitan dengan batas-batas maritim di Laut Kaspia dan hak penggunaan sumber daya alam di wilayah tersebut, terutama sumber daya energi seperti minyak dan gas alam. Dalam konteks ini, Turki mendukung posisi Azerbaijan dalam sengketa ini berdasarkan perjanjian

pertahanan yang menyatakan jika Azerbaijan diserang maka Turki akan membantu (Jones, 2022).

Ketiga, pada konflik Nagorno-Karabakh tahun 2020, Presiden Turki R.T. Erdogan berbicara kepada rakyat Azerbaijan, menyatakan bahwa “tekad dan keterampilan kepemimpinan Presiden Ilham Aliyev, serta kepahlawanan personel militer Azerbaijan adalah faktor utama kemenangan”, dengan demikian sekali lagi menekankan dukungan komprehensif Turki untuk Republik Azerbaijan.

Keempat, Turki mengembargo ekonomi Armenia. Turki memberlakukan embargo sebagai solidaritas dengan Azerbaijan, setelah pasukan Armenia menduduki hampir 20 persen wilayah Azeri selama perang memperebutkan daerah Nagorno-Karabakh yang disengketakan (VOA, 2009).

Kelima, menolak untuk menormalisasi hubungan dengan Armenia. Turki pernah merencanakan adanya normalisasi hubungan dengan Armenia. Mengetahui hal tersebut Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengancam akan berhenti menjual gas alam ke Turki dengan harga rendah dan mengumumkan bahwa Azerbaijan akan mencari rute di sekitar Turki untuk mengirimkan gas ke Eropa. Beberapa hari kemudian, Turki memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut dengan mengatakan bahwa Azerbaijan adalah bagian dari Turki (Radio Free Europe Radio Liberty, 2009).

Dalam menghadapi perang Nagorno Karabakh pertama ini, kebijakan luar negeri Turki hingga 2010 menerapkan strategi untuk mempromosikan dialog antara Armenia dan Azerbaijan, tetapi pada tahun 2020, Turki secara terbuka menjadi pemain pro-konflik yakni membantu Azerbaijan secara agresif. Turki secara

konsisten mengadvokasi posisi adil bagi Azerbaijan terkait pendudukan militer ilegal atas wilayahnya yang diakui secara internasional oleh Armenia selama hampir 28 tahun. Turki memberikan dukungan politik dan militer yang kuat selama perang 44 hari melawan Armenia antara 27 September-10 November yang menghasilkan kemenangan Azerbaijan atas Armenia.

Pada tahun 2020, keterlibatan Turki dalam membantu kemenangan Azerbaijan diantaranya kerjasama di bidang pertahanan. Azerbaijan menerima peralatan militer dari Turki berupa pesawat tanpa awak dengan model Bayraktar TB2. Pesawat tanpa awak bernama Bayraktar TB2 ini dilengkapi dengan empat rudal mikro munisi pintar (MAM-L) yang mampu menghancurkan kendaraan lapis baja. Pada pertengahan tahun 2020, Azerbaijan berhasil mengalahkan pertahanan Armenia di Nagorno-Karabakh menggunakan drone ini. Setelah 30 tahun bertempur, kedua negara memutuskan untuk menandatangani gencatan senjata dan mengakui kemenangan Azerbaijan atas wilayah Nagorno-Karabakh sebagai hasil dari keberhasilan pertempuran (CNN Indonesia, 2020)

GAMBAR 2.2 DRONE BAYRAKTAR TB 2



Sumber: (BBC,2020)

Drone Bayraktar TB 2 buatan Turki merupakan sebuah pencapaian besar mengingat Amerika Serikat memberlakukan embargo terhadap negara tersebut, sehingga mustahil bagi Turki untuk membeli senjata pertahanan udara. Kini setelah tekanan yang Amerika berikan, Turki mampu memproduksi pesawat tanpa awak yang setara dengan model buatan Amerika. Tidak hanya diuji dalam Latihan militer Turki, kemampuan drone mampu menjadi pesaing senjata buatan negara barat sehingga juga dipakai dalam pertempuran nyata oleh Azerbaijan, Qatar dan Ukraina. (Abdad, 2022)

Berbagai deklarasi tingkat tinggi menunjukkan dukungan Turki yang jelas terhadap kegiatan militer Azerbaijan. Presiden Recep Tayyip Erdogan menekankan bahwa rakyat Turki akan terus memperkuat solidaritas mereka dan bahwa mereka akan selalu mendukung saudara-saudara Azerbaijan. Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Turki, Azerbaijan tidak diragukan lagi akan menggunakan haknya untuk mempertahankan diri untuk menyelamatkan integritas teritorial dan penduduknya. Turki akan selalu mendukung Azerbaijan dengan sepenuh hati dalam situasi ini. Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu menyatakan bahwa Turki mendukung Azerbaijan baik di lapangan maupun di meja perundingan (Insight Turkey, 2021). Pada akhir operasi selama 44 hari tersebut, Azerbaijan berhasil membebaskan wilayah-wilayah Baku yang direbut dengan bantuan militer dan diplomatik Turki.

Partisipasi Turki dalam memperkuat kekuatan militer Azerbaijan selama tiga dekade sama pentingnya bagi keberhasilan Azerbaijan seperti halnya suplai militernya yang unggul. Setelah kemerdekaan Azerbaijan pada tahun 1992, dan dengan berakhirnya Perang Dingin, dorongan pembangunan militer ini mulai

berjalan. Militer Azerbaijan mampu membangun kemampuan sumber daya manusia yang kuat dan keterampilan komando yang kompeten berkat pendidikan dan pelatihan militer. Dalam waktu kurang dari 30 tahun, Turki berhasil menerapkan tradisi kepatuhan dan disiplin yang ketat pada angkatan bersenjata Azerbaijan (Fitra, 2023). Langkah Turki dalam membantu Azerbaijan dengan militer, politik, dan diplomatik berhasil membuahkan hasil.

2.3 Hubungan Turki – Armenia

Hubungan antara Turki dan Armenia dapat dikatakan tidak baik atau lebih tepatnya bermusuhan. Secara historis hubungan keduanya bersitegang karena adanya sejarah kelam genosida Armenia, keduanya pun tidak memiliki hubungan diplomatik (Sariaslan, 2023). Namun, telah ada beberapa upaya normalisasi namun belum sepenuhnya berjalan karena masalah terkait Nagorno Karabakh. Perang Karabakh, yang dimulai dengan serangan Armenia ke Azerbaijan, mencegah pembentukan hubungan diplomatik dan peningkatan hubungan bilateral antara Turki dan Armenia. Setelah pendudukan Armenia di wilayah Kalbajar, Azerbaijan, Turki menutup perbatasannya dengan Armenia pada tahun 1993 (fiona hill, 2015).

Pada tanggal 1 Maret 2018 Presiden Armenia Serzh Sargsyan menyatakan protokol Armenia dan Turki yang bertujuan untuk menormalisasi hubungan bilateral batal. Adanya ingatan kolektif Armenia yakni adanya perasaan menjadi korban yang mengakar di Armenia, dan persepsi Turki sebagai pelaku utama semakin menguat sejak pecahnya Uni Soviet dan terutama karena pecahnya konflik Nagorno-Karabakh. Hal terakhir ini mendorong Azerbaijan dan Turki untuk menerapkan blokade yang melumpuhkan terhadap Armenia. Khususnya, masyarakat Armenia semakin membenci musuh bersejarah Turki dan sekutunya

Azerbaijan. Namun demikian, selama masa kepresidenannya dari tahun 1991 hingga 1998 dan khususnya pada pertengahan tahun 1990-an, Presiden pertama Armenia L. Ter-Petrosyan berupaya untuk mencegah berkembangnya sikap anti-Turki dalam kesadaran publik Armenia, dan yang paling penting menghilangkan narasi korban-pelaku.

Menurutnya Petrosyan, tantangan-tantangan yang dihadapi negara Armenia telah mengesampingkan konflik-konflik bersejarah, dan mengedepankan manfaat ekonomi dan politik dari kerja sama dengan Azerbaijan dan Turki. Selain itu, ia secara mendasar mengubah gambaran Azerbaijan dan Turki, yang berubah dari musuh historis menjadi 'sekutu paling alami' Armenia (TerPetrosyan, 2006, hlm. 553-554).

Analisis terhadap pidato kebijakan luar negeri Ter-Petrosyan menunjukkan bahwa ia tidak terlalu mementingkan identitas dalam kebijakan luar negeri Armenia, dan memprioritaskan pertimbangan politik dan ekonomi pragmatis. Pada dasarnya, Ter-Petrosyan melihat identitas dan ingatan kolektif sebagai hal yang merugikan pembangunan negara, dan dengan demikian berupaya memasukkan pemikiran politik Armenia dengan rasionalisme dan pragmatisme (Terzyan, 2016a, hal. 149). Karena alasan inilah pemerintahan Ter-Petrosyan tidak memasukkan isu pengakuan Genosida ke dalam agenda kebijakan luar negerinya, mengingat kemungkinan dampaknya terhadap hubungan Armenia-Turki.